



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan (Kotak Pos 46)

Telepon : (021) 5253004

Laman : [www.kemerkumham.go.id](http://www.kemerkumham.go.id)

**PENGUMUMAN**

NOMOR : M.HH.KP.02.04-134

TENTANG

PENERIMAAN CALON TARUNA/TARUNI SEKOLAH KEDINASAN  
POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN (POLTEKIP)  
DAN CALON TARUNA/TARUNI SEKOLAH KEDINASAN POLITEKNIK IMIGRASI (POLTEKIM)  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2018

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/226/M.SM.01.00/2018 tentang Persetujuan Prinsip Tambahan Kebutuhan CPNS dari Taruna/Taruni Poltekkip/Poltekim Tahun Anggaran 2018, **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA** mengundang putra dan putri terbaik lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Sederajat dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) dengan ketentuan sebagai berikut:

**A. PERSYARATAN**

1. Warga Negara Republik Indonesia.
2. Pria/Wanita.
3. Pendidikan SLTA sederajat dengan nilai rata-rata yang terdapat dalam ijazah sekurang-kurangnya 7,0 (skala penilaian 1-10) / 70,00 (skala penilaian 10-100) / 2,85 (skala penilaian 1-4) / B (skala penilaian 1-4 dengan huruf) dan nilai Bahasa Inggris pada raport kelas XII sekurang-kurangnya 7,0 (skala penilaian 1-10) / 70,00 (skala penilaian 10-100) / 2,85 (skala penilaian 1-4) / B (skala penilaian 1-4 dengan huruf).
4. Khusus untuk lulusan SLTA sederajat dari wilayah Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat diberikan afirmasi berupa nilai rata-rata yang terdapat dalam ijazah sekurang-kurangnya 6,2 (skala penilaian 1-10) / 62,00 (skala penilaian 10-100) / 2,51 (skala penilaian 1-4) / B- (skala penilaian 1-4 dengan huruf) dan nilai Bahasa Inggris pada raport kelas XII sekurang-kurangnya 6,2 (skala penilaian 1-10) / 62,00 (skala penilaian 10-100) / 2,51 (skala penilaian 1-4) / B- (skala penilaian 1-4 dengan huruf).
5. Usia pada tanggal 1 April 2018 serendah-rendahnya 17 tahun dan tidak lebih dari 22 tahun (dibuktikan dengan akte Kelahiran/surat keterangan lahir).
6. Tinggi Badan minimal Pria 165 cm, Wanita minimal 158 cm, berat badan seimbang (ideal) berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat verifikasi dokumen asli.
7. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, tidak memakai kacamata dan/atau softlens, tidak tuli, dan tidak buta warna.
8. Bagi pria tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik telinganya atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat.
9. Bagi wanita tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga dan tidak bertindik/bekas tindik di telinga lebih dari 1 pasang (telinga kiri dan kanan).
10. Belum pernah menikah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah/ Kepala Desa dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan.

11. Bersedia ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi di seluruh Wilayah Indonesia.
12. Tidak pernah putus studi/ drop out (DO) dari POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN dan POLITEKNIK IMIGRASI dan atau Akademi/Sekolah Kedinasan Pemerintah lainnya;
13. Membuat dan mengisi formulir pernyataan dan melengkapi surat-surat keterangan lainnya setelah dinyatakan diterima sebagai Calon Taruna/Taruni.
14. Tidak sedang menjalani ikatan dinas/ pekerjaan dengan instansi/ perusahaan lain.
15. Bagi pelamar yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM, selain harus memenuhi persyaratan diatas (angka 1 s.d. 13), juga harus memenuhi syarat :
  - a. Mendapatkan persetujuan untuk mengikuti pendidikan ikatan dinas dengan pangkat/gol. ruang setinggi-tingginya Pengatur Muda Tk.I/ (II/b) dibuktikan dengan surat pengantar dari Pejabat Pimpinan Tinggi (Pimpinan Unit Eselon I atau Kepala Kantor Wilayah);
  - b. Umur pada tanggal 1 April 2018 setinggi-tingginya 25 tahun, yang dibuktikan dengan akte/surat keterangan lahir;
  - c. Tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja;
  - d. PPKP tahun 2016 dan PPKP tahun 2017 minimal bernilai baik dan seluruh komponen / unsur penilaian PPKP minimal baik serta telah membuat SKP tahun 2018 pada sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG);
  - e. Hanya mendaftar di 1 (satu) program pendidikan yang sesuai dengan formasi asal PNS (PNS di jajaran Pemasyarakatan hanya boleh mendaftar di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) dan PNS di jajaran Imigrasi hanya boleh mendaftar di POLTEKIM).

## B. KUOTA FORMASI TARUNA/TARUNI SEKOLAH KEDINASAN

Kuota Formasi umum untuk Sekolah Kedinasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 600 Taruna/Taruni (Sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/226/M.SM.01.00/2018) dan kuota formasi khusus PNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak lebih dari 20 formasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kuota Formasi Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) 300 Taruna/Taruni terdiri dari:
  - Pria = 225 Taruna
  - Wanita = 75 Taruni
2. Kuota Formasi Sekolah Kedinasan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) 300 Taruna/Taruni terdiri dari:
  - Pria = 225 Taruna
  - Wanita = 75 Taruni
3. Pelamar dari Pegawai untuk Formasi Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) dengan kriteria Pegawai yang telah diangkat sebagai PNS Kementerian Hukum dan HAM kuota formasi masing-masing paling banyak berjumlah 10 orang (diluar formasi pada angka 1 dan 2)

## C. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar wajib melakukan pendaftaran secara online melalui portal <https://sscndikdin.bkn.go.id> dimulai tanggal 9 April s.d. 30 April 2018, untuk mendapatkan *username* dan *password*, kemudian mencetak tanda bukti pendaftaran I, setelah mencetak tanda bukti pendaftaran I pelamar wajib melakukan pendaftaran ke-2 untuk mengisi biodata dan mengunggah berkas lamaran serta mencetak tanda bukti pendaftaran II melalui <http://catar.kemenkumham.go.id> dimulai tanggal 9 April s.d. 30 April 2018.

2. Khusus bagi pelamar yang telah diangkat sebagai PNS Kementerian Hukum dan HAM melakukan pendaftaran, unggah berkas lamaran dan cetak tanda bukti pendaftaran II secara online dimulai tanggal 9 April s.d 30 April 2018 pada portal <http://catar.kemenkumham.go.id> (tidak melalui portal <https://sscndikdin.bkn.go.id>)
3. Pelamar hanya boleh memilih 1 (satu) pilihan Sekolah Kedinasan, apabila terdapat kesalahan dalam memilih sekolah kedinasan, maka akan menjadi tanggung jawab pelamar sendiri, panitia tidak dapat merubahnya dan apabila memilih lebih dari 1 (satu) pilihan Sekolah Kedinasan maka pelamar tersebut secara otomatis dinyatakan gugur / tidak dapat mengikuti tahapan seleksi administrasi.
4. Unggah berkas lamaran dalam bentuk PDF dan JPG terdiri dari:
  - a. Surat lamaran bermaterai Rp. 6000,- ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta dan ditandatangani dengan pena berwarna hitam (format surat lamaran dapat diunduh di <http://catar.kemenkumham.go.id>). (format file Pdf. min. 500 Kb. maks. 1 Mb)
  - b. Kartu Tanda Penduduk yang telah elektronik (KTP) atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik (asli) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. (format file Pdf. min. 500 Kb. maks. 1 Mb)
  - c. Ijasah (asli), bagi lulusan luar negeri/ memiliki ijasah berbahasa asing melampirkan pula surat penyetaraan/ persamaan ijasah dari pejabat yang berwenang. (format file Pdf. min. 500 Kb. maks. 1 Mb)
  - d. Transkrip Nilai Ijasah (asli). (format file Pdf. min. 500 Kb. maks. 1 Mb)
  - e. Nilai Raport kelas XII (asli). (format file Pdf. min. 500 Kb. maks. 1 Mb)
  - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polres/ Polwiltabes/ Polda masih berlaku (asli). (format file Pdf. min. 500 kb maks. 1 Mb)
  - g. Akta kelahiran / Surat Keterangan Lahir (asli) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (bukan dari bidan atau puskesmas). (format file Pdf. min. 500 Kb. maks. 1 Mb)
  - h. Surat keterangan berbadan sehat, tidak buta warna dan tidak tuli dari dokter RS. Pemerintah/ RS. TNI/ RS. Polri (asli). (format file Pdf. min. 500 Kb. maks. 1 Mb)
  - i. Surat Keterangan belum pernah menikah yang ditandatangani oleh Lurah / Kepala Desa sesuai domisili (asli) (bukan surat yang ditandatangani oleh pelamar, ketua RT, ketua RW atau orang tua). (format file Pdf. min. 500 Kb. maks. 1 Mb)
  - j. Surat Pernyataan 6 point dari pelamar yang berisi tentang sanggup mentaati perjanjian ikatan dinas, Sanggup mengganti seluruh biaya selama mengikuti pendidikan apabila mengundurkan diri, Bersedia ditempatkan diseluruh Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan, Sanggup tidak menikah selama pendidikan, tidak terikat dengan instansi pemerintah lain/ swasta dan tidak mengkonsumsi/ menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya ditandatangani dengan pena berwarna hitam, bermaterai Rp. 6000,-. (dapat diunduh <http://catar.kemenkumham.go.id>). (format file Pdf. min. 500 Kb. maks. 1 Mb)
  - k. Pas photo berlatar belakang warna merah untuk POLTEKIP dan warna biru untuk POLTEKIM. (Format file Jpg. Max. 1Mb)
  - l. Tanda bukti cetak/print pendaftaran I dari portal <https://sscndikdin.bkn.go.id> (format file Pdf. min. 500 Kb. maks. 1 Mb)
  - m. Khusus bagi pelamar lulusan SLTA Sederajat Tahun 2018, persyaratan pada huruf c, d dan e dapat digantikan dengan Surat Keterangan Mengikuti Ujian Nasional yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah / pejabat yang berwenang (asli). (format file Pdf. min. 500 Kb. maks. 1 Mb)
  - n. Bagi pelamar yang telah diangkat sebagai PNS Kemenkumham, selain melampirkan persyaratan pada huruf a sampai huruf k, juga melampirkan:
    - 1) Surat Persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi (Pimpinan Unit Eselon I atau Kepala Kantor Wilayah). (format file Pdf. min. 500 Kb. maks. 1 Mb)
    - 2) Surat Keterangan tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari Kepala Satuan Kerja. (format file Pdf. min. 500 Kb. maks. 1 Mb)
    - 3) Unggah SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, PPKP tahun 2016, PPKP tahun 2017 dan SKP tahun 2018 di <http://simpeg.kemenkumham.go.id>. (format file Pdf. min. 500 Kb. maks. 1 Mb)

#### D. SELEKSI DENGAN SISTEM GUGUR MELALUI TAHAPAN

1. Seleksi Administrasi (Verifikasi Berkas Unggah, verifikasi berkas asli dan pengukuran tinggi badan).
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
3. Seleksi Lanjutan
  - a. Seleksi Kesehatan.
  - b. Seleksi Kesamaptaan.
  - c. Seleksi Tulis Psikotes dan Wawancara Psikotes.
  - d. Seleksi Wawancara, Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPFK).

#### E. LAIN-LAIN

1. Politeknik Ilmu Pemasarakatan (POLTEKIP) merupakan pendidikan sekolah kedinasan Diploma IV di bidang teknis Pemasarakatan dengan program kuliah selama 4 (empat) tahun setara dengan Strata 1 (S-1), yang akan ditempatkan dalam Jabatan Penelaah Status Warga Binaan Pemasarakatan atau Analis Pemasarakatan.
2. Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) merupakan pendidikan sekolah kedinasan Diploma IV di bidang teknis Keimigrasian dengan program kuliah selama 4 (empat) tahun setara dengan Strata 1 (S-1), yang akan ditempatkan dalam Jabatan Analis Keimigrasian.
3. Bagi pelamar lulusan SLTA Sederajat Tahun 2018, apabila sudah dinyatakan lulus pada tahap seleksi tulis psikotes dan wawancara psikotes, sebelum mengikuti seleksi wawancara, pengamatan fisik dan keterampilan wajib menunjukkan Surat Keterangan Lulus (SKL) dan melampirkan Nilai rata-rata yang tertulis di ijasah serta nilai bahasa inggris dalam raport kelas XII yang ditandatangani Kepala Sekolah atau pejabat yang berwenang. Panitia akan menyatakan gugur apabila dokumen-dokumen tersebut tidak dapat ditunjukkan atau nilai tidak memenuhi syarat sebagaimana pengumuman.
4. Seluruh peserta pada tahapan Seleksi Kompetensi Dasar, kelulusannya didasarkan pada nilai ambang batas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
5. Apabila dikemudian hari diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka Ketua Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan calon Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan.
6. Bagi pelamar yang tidak melakukan pendaftaran ulang di <http://catar.kemenkumham.go.id> dan/atau tidak mengunggah salah satu / seluruh berkas lamaran dan/atau mengunggah dokumen dan/atau memilih/klik/mengisi data yang tidak sesuai sebagaimana diatur dalam pengumuman ini / tidak benar maka pelamar tersebut tidak akan dapat mengikuti seleksi administrasi / gugur/tidak lulus seleksi administrasi.
7. Bagi pelamar/peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
8. Kesalahan dan/atau lalai dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
9. Seluruh proses pelaksanaan seleksi berlokasi di Jakarta.
10. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan Kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
11. Bagi calon Taruna/Taruni sekolah kedinasan yang dinyatakan lulus tahapan seleksi akhir (kelulusan akhir) wajib mengikuti pendidikan dan tidak disediakan asrama;
12. Bagi calon Taruna/Taruni sekolah kedinasan yang dinyatakan lulus tahapan seleksi akhir (kelulusan akhir) kemudian mengundurkan diri dan/atau tidak melapor akan diberikan sanksi administrasi yakni tidak dapat mendaftar pada tahun berikutnya sebagaimana

diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

13. Seluruh biaya yang timbul dari kegiatan Seleksi Taruna/Taruni sekolah kedinasan Poltekip dan Poltekim dibebankan pada DIPA Kementerian Hukum dan HAM.
14. Peserta dalam mengikuti seleksi tidak dipungut biaya.
15. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat
16. Informasi lebih lanjut dapat dilihat dari portal <https://sscndikdin.bkn.go.id> atau <http://catarkumham.go.id>, atau twitter @catarkumham.
17. Pengaduan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan seleksi di Nomor 081240606742 (hanya menerima whatsapp dan SMS).

Dikeluarkan di Jakarta

Tanggal, 6 April 2018.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,



*[Handwritten signature]*  
Yasmina H. Laoly

**JADWAL SELEKSI PENERIMAAN  
CALON TARUNA/TARUNI SEKOLAH KEDINASAN  
POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN (POLTEKIP) DAN  
POLITEKNIK IMIGRASI (POLTEKIM)  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2018**

NO	TANGGAL	KEGIATAN
1.	9 – 30 April 2018	Pendaftaran Online <a href="https://sscndikdin.bkn.go.id">https://sscndikdin.bkn.go.id</a>
2.	9 – 30 April 2018	Pendaftaran Online Instansi (Kemenkumham) ( <a href="http://www.catar.kemenkumham.go.id">http://www.catar.kemenkumham.go.id</a> )
3.	7 Mei 2018	Pengumuman Kelulusan Seleksi Administrasi berdasarkan verifikasi berkas lamaran yang di unggah
4.	14 – 17 Mei 2018	Verifikasi Berkas Asli, Pengukuran Tinggi Badan dan Pemberian Kartu Peserta Ujian
5.	23 Mei - 26 Mei 2018	Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
6.	30 Mei 2018	Pengumuman Kelulusan SKD
7.	4 Juni - 7 Juni 2018	Tes Kesehatan
8.	11 Juni 2018	Pengumuman Kelulusan Tes Kesehatan
9.	28 Juni - 30 Juni 2018	Tes Kesamaptaan
10.	3 Juli 2018	Pengumuman Kelulusan Tes Kesamaptaan
11.	9 Juli - 12 Juli 2018	Tes Tulis Psikotes dan Wawancara Psikotes
12.	20 Juli 2018	Pengumuman Kelulusan Tes Tulis Psikotes dan Wawancara Psikotes
13.	24 Juli – 28 Juli 2018	Tes Wawancara, Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPFK)
14.	31 Juli 2018	Pengumuman Tes Wawancara Pengamatan Fisik dan Keterampilan (Kelulusan Akhir)

\*) perubahan jadwal seleksi dapat dilihat laman <http://catar.kemenkumham.go.id>



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,

*(Signature)*  
Yasonna H. Laoly